

**BAGAIMANA OPEN GOVERNMENT DITERAPKAN DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH?
(Sebuah Analisis dengan Menggunakan *Soft Systems
Methodology*)**

Premilasari¹
Sadu Wasistiono²
Hadi Prabowo³
Hyronimus Rowa⁴
Alma'arif⁵

*Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia^{1,2,3,4,5}
Jalan Ir. Soekarno Desa No.KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat 45363*

Alamat email koresponden: almaarif@ipdn.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the aspects of open government in regional development planning and analyze the ideal development planning in adopting aspects of open government. This research design uses a qualitative approach with Soft Systems Methodology (SSM). Data analysis technique using CATWOE analysis (Customer, Actor, Transformation, Weltanschauung, Owner, and Environment). The results of this study indicate that 1) Regional development planning has naturally adopted aspects of the OG, namely participation, transparency, and collaboration but have not been carried out intentionally (by design) so that the determination of the activity program in the RAPBD is not in accordance with the results of the Musrenbang; 2) There is a guarantee of transparency in every development planning process and the maximization of the use of ICT is a requirement for the adoption of OG aspects in ideal development planning. This study also recommends conducting special research related to OG and enrichment of the concepts of participation and transparency.

Keywords: *Transparency; Sof System Methodology; Local Development Planning.*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek *open government* dalam perencanaan pembangunan daerah dan menganalisis perencanaan pembangunan yang ideal dalam mengadopsi aspek-aspek *open government*.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Soft Systems Methodology (SSM). Teknik analisis data dengan menggunakan analisis CATWOE (Customer, Actor, Transformation, Weltanschauung, Owner, dan Environment). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perencanaan pembangunan daerah sudah secara alamiah telah mengadopsi aspek-aspek dari OG yaitu partisipasi, transparansi, dan kolaborasi namun belum dilakukan secara sengaja (*by design*) sehingga penetapan program kegiatan dalam RAPBD tidak sesuai dengan hasil musrenbang; 2) Adanya jaminan transparansi dalam setiap proses perencanaan pembangunan dan maksimasi penggunaan TIK menjadi syarat diadopsinya aspek-aspek OG dalam perencanaan pembangunan yang ideal. Penelitian ini juga merekomendasikan dilakukannya penelitian khusus terkait OG dan pengayaan konsep partisipasi dan transparansi.

Kata kunci: Transparansi, *Soft Systems Methodology*, Perencanaan Pembangunan Daerah

PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma administrasi publik sejak awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Wilson dengan Old Public Administration hingga New Public Governance melahirkan perubahan pada pola interaksi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai penyedia layanan (Osborne, 2006:2). Perubahan pola interaksi tersebut ditunjukkan dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap akses pemerintahan. Salah satu yang berkembang adalah konsep Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008:3; Emerson & Nabatchi, 2015:5), konsep Governing by Network (Goldsmith & Eggers, 2004:24), dan konsep Open Government (Lathrop & Ruma, 2010:21; McDermott, 2010:11; Obama, 2009).

Open Government sebagai salah satu konsep yang berasal dari paradigma New Public Governance berkembang dan dikenal sejak Presiden Amerika Serikat yaitu Barrack Obama memperkenalkannya pada pidato kenegaraannya (Lathrop, D & Ruma, 2013). Perkembangan konsep tersebut diakibatkan tingginya tuntutan masyarakat Amerika Serikat untuk terlibat

dalam pembuatan kebijakan publik sehingga terbentuk Open Government Partnership (OGP) dalam sidang umum PBB diinisiasi oleh delapan negara, salah satunya Indonesia (Hendrawan, 2019).

Pada tataran praktek, Open Government secara internasional melalui Global Open Data Index menetapkan 15 (lima belas) aspek yang dinilai keterbukaannya, yaitu 1) Government Budget; 2) National Statistic; 3) Procurement; 4) National Laws; 5) Administratives Boundaries; 6) Draft Legislation; 7) Air Quality; 8) National Maps; 9) Weather Forecast; 10) Company Register; 11) Elections Results; 12) Locations; 13) Water Quality; 14) Government Spending; dan 15) Land Ownership (“Data Open Government,” 2021).

Tabel 1. Global Open Government Data

Peringkat	Negara	%
1	Taiwan	90
2	Australia	79
2	Britania Raya	79
5	Kanada	69
5	Finlandia	69
17	Singapura	60
51	Thailand	34
dst		
61	Indonesia	25

Sumber: (“Data Open Government,” 2021)

Indonesia, sebagai salah satu negara inisiator OGP, masih termasuk dalam kategori negara yang tidak terbuka (non-open state) dengan keterbukaan 25 persen, masih berada dibawah Singapura dan Thailand di Asia Tenggara. Global Open Data Index menyebutkan bahwa Indonesia hanya terbuka pada bidang statistic nasional, peraturan perundang-undangan, dan anggaran pemerintah, tetapi masih tertutup pada aspek yang lainnya (“Data Open Government,” 2021). Diantara data yang belum terbuka tersebut, aspek kualitas udara, kualitas air, hasil pemilihan umum,

perencanaan pembangunan dan penganggaran sangat sulit untuk diakses (Nunuk Febrianingsih, 2012).

Tahun 2018, Indonesia membentuk Open Government Indonesia (OGI) yang mewajibkan setiap daerah melakukan reformasi administrasi dengan transparansi data penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat ("Open Gov. Indones.," 2021). OGI mewajibkan setiap daerah otonom dalam hal ini Kabupaten/Kota dan Provinsi melakukan reformasi sector public dengan membuka data penyelenggaraan pemerintahan yang akan bermuara pada tingginya inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan inovasi sebagai respon dari tuntutan masyarakat yang tinggi ("Open Gov. Indones.," 2021). Hal ini menunjukkan bahwa saat ini setiap daerah otonom berkewajiban untuk menyediakan data yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat termasuk data-data yang masih dianggap "sakral" untuk dipublikasikan seperti data keuangan dan perencanaan pembangunan.

Setengah decade sebelum ditetapkannya OGI sebagai program nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan OG untuk kabupaten/kota hingga desa dalam wilayah Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) mengamanatkan adanya kesatuan data terkoneksi mulai dari desa hingga provinsi yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Sumber lain menyebutkan bahwa diantara sekian banyak kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi adalah daerah yang mendapatkan bimbingan khusus dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan open data melalui perwujudan smartcity (Leski Rizkinaswara, 2018:15).

Sebagaimana diungkapkan oleh Obama dalam orasi kemenangan keduanya bahwa OG dicirikan atas adanya partisipasi, kolaborasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan (Lathrop, D & Ruma,

2013:5). Dilansir dari situs berita lokal yang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi setidaknya menjadi daerah di Provinsi Jawa Barat yang paling banyak mendapatkan pengaduan masyarakat ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali pada tahun 2018 (Admin, 2020). Substansi dari laporan tersebut adalah sulitnya masyarakat mendapatkan informasi khususnya dari Dinas Pembangunan dan Bina Marga terkait perencanaan dan penggunaan anggaran. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang memperbolehkan setiap warga negara untuk memperoleh informasi public dari badan public diluar informasi yang dikecualikan.

Sementara pada substansi penyediaan informasi melalui penyediaan situs resmi pemerintah daerah dalam rangka transparansi, Pemerintah Kabupaten Bekasi masih mengalami permasalahan internal. Tidak jelasnya tugas pokok dan fungsi mengakibatkan bagian Humas Sekretariat Daerah dan Dinas Informasi dan Komunikasi berselisih terkait pengelolaan situs pemerintah daerah (Mahmud, 2019). Hal ini bertentangan dengan konsep transparansi Obama mengingat pengelolaan Website sebagai instrument transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut adanya profesionalisme operator dan organisasi pengelolanya (G. Lee & Kwak, 2012:3; Obama, 2009).

Selain itu, dalam aspek perencanaan pembangunan, Kabupaten Bekasi masih memiliki masalah tersendiri utamanya dalam pembangunan perdesaan. Adanya Dana Desa, Dana Alokasi Khusus dan Dana Pembangunan mengakibatkan objek pembangunan di desa memiliki lokasi yang sama. Sementara disisi lain, terdapat desa atau bagian desa yang sama sekali tidak terbangun. Hal ini dikarenakan Musrenbang yang dilakukan di Kecamatan hanya dihadiri oleh kalangan elit desa dan sangat

sedikit masyarakat desa (Berita, 2020). Akibatnya adalah terdapat 20 desa kumuh yang kondisinya masih kumuh, padahal anggaran pembangunan yang digelontorkan cukup besar yakni sekitar 60,2 miliar setiap tahun. Akhirnya, terdapat desa yang surplus pembangunan dan disisi lain ada desa yang tidak tersentuh pembangunan daerah. Hal ini bertentangan dengan yang diungkapkan oleh Batty dkk bahwa database yang baik menjadi faktor dalam pembuatan kebijakan public (Batty et al., 2012:5).

Open Government dianggap sebagai instrumen transparansi data oleh pemerintah agar dapat diakses oleh masyarakat luas (Bearfield & Ann O’M. Bowman, 2016; da Cruz et al., 2016; Florini, 2007; Grønbech-Jensen, 1998; Worthy et al., 2017; Yang et al., 2015), Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan (Essa, 2018; S. Y. Lee et al., 2019), akuntabilitas kinerja pemerintah kepada masyarakat (Baltador & Budac, 2014), dan stimulasi terciptanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, swasta termasuk NGO (Abu-Shanab, 2015; G. Lee & Kwak, 2012). Bahkan (Hansson et al., 2015) mengungkapkan bahwa penelitian terkait Open Government saat ini lebih kepada transparansi data dengan sedikit mengungkapkan aspek demokrasi yaitu kolaborasi dan partisipasi. Penelitian mengenai Open Government telah dilakukan oleh peneliti dari berbagai fokus dan disiplin ilmu.

Tabel 2. Penelitian terdahulu terkait Open Government

Studi	Tema			
	Open Government	Participation in Open Government	Transparency in Government	Collaboration in Government
ICT/Computer Review	(Hansson et al., 2015; McDermott, 2010; Nam, 2016)		(McDermott, 2010; Nam, 2016)	

Studi	Tema			
	Open Government	Participation in Open Government	Transparency in Government	Collaboration in Government
Social Science	(Bearfield & Ann O'M. Bowman, 2016; da Cruz et al., 2016; Grønbech-Jensen, 1998; Yang et al., 2015)	(Essa, 2018; S. Y. Lee et al., 2019; Wirtz et al., 2017)	(Bearfield & Ann O'M. Bowman, 2016; da Cruz et al., 2016; Grønbech-Jensen, 1998; Worthy et al., 2017; Yang et al., 2015)	(Wirtz et al., 2017)
Information Science	(Florini, 2007; McDermott, 2010; Yang et al., 2015)		(Florini, 2007; McDermott, 2010; Yang et al., 2015)	(Abu-Shanab, 2015; G. Lee & Kwak, 2012)
Economic Science	(da Cruz et al., 2016)		(Baltador & Budac, 2014; da Cruz et al., 2016)	

Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2022.

Tabel 2 menunjukkan penelitian terkait open government pada umumnya berasal dari kajian Teknologi Informasi dan Komunikasi termasuk ilmu informasi. Sementara pakar yang meriset OG dari aspek administrasi publik hanya membahas secara umum akan aktivitas pemerintahan yang terbuka, belum fokus kepada mekanisme perencanaan pembangunan. Dengan demikian pertanyaan dalam studi ini adalah bagaimana aspek-aspek Open Government diadopsi dalam perencanaan pembangunan daerah?

METODE PENELITIAN

Soft System Methodology (SSM) menurut (Jackson, 2001) tepat untuk melihat masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, berbeda dengan hard system yang tepat mengatasi masalah yang telah terdefinisi dan terstruktur

dengan baik. Studi ini memilih open government sebagai konsep dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan proses perencanaan pembangunan seharusnya melibatkan banyak aktor khususnya masyarakat dengan aktor pemerintah menjadi utama (London, n.d.; Riyadi & Bratakusumah, 2003). Pengumpulan data dalam SSM dapat dilakukan dalam beberapa cara seperti berbicara secara informal kepada aktor yang terkait, ikut serta dalam rapat terkait, membaca dokumen terkait, melakukan wawancara, bahkan *having a drunk in the public after work* (Checkland & Poulter, 2006). Pada studi ini data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik dokumentasi dan wawancara.

PEMBAHASAN

Situasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bekasi secara formatif telah mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana dalam aturan tersebut diatur mekanisme perencanaan secara bottom-up mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten/kota. Tetapi secara empiris, perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (musrenbangdes), masyarakat sudah mulai tidak mengindahkan kegiatan musrenbangdes dan lebih memberikan kepercayaan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengikuti acara musrenbang. Hal ini oleh informan 4 dikarenakan musrenbangdes hanya formalitas. Semua program kegiatan yang diusulkan pada saat musrenbang desa dan kecamatan pada akhirnya yang direalisasikan itu hanya maksimal satu sampai dua kegiatan saja padahal yang diusulkan lebih dari tiga puluh kegiatan prioritas setiap desa. Selain itu, kegiatan yang diusulkan oleh desa dan kecamatan hampir setiap tahun sama sementara perubahan kondisi di lapangan sudah berbeda sehingga mengakibatkan degradasi kepercayaan publik. Harapannya musrenbang akan menjadi media efektif dalam merealisasikan

keinginan masyarakat. oleh sebab itu, Clark dalam identifikasi defenisi partisipasi mengatakan bahwa partisipasi dapat mewujudkan keadilan sosial namun jika partisipasi dianggap tidak memiliki dampak atau hasil, maka partisipasi tidak pernah memperbaiki kualitas keadilan sosial (Clark, 2018).

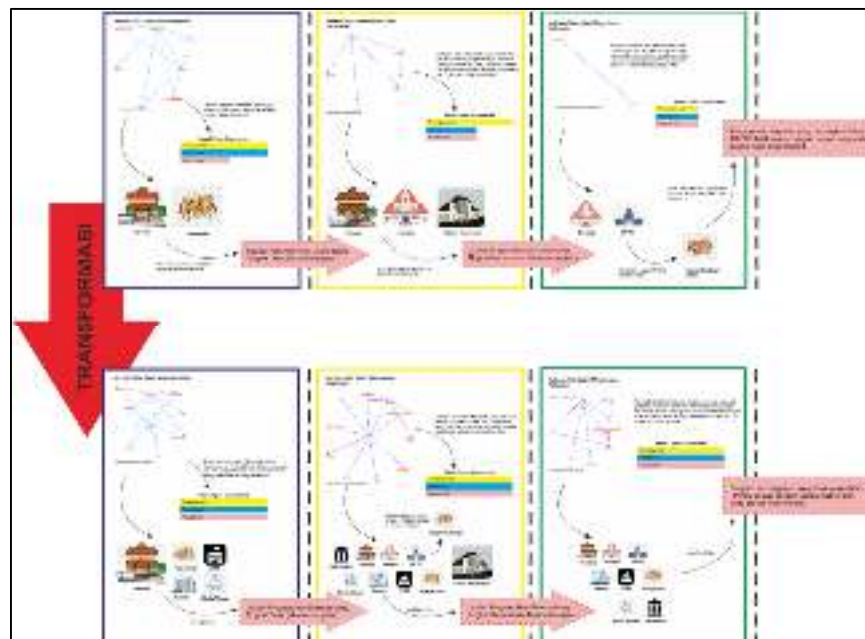
Pada sisi pemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh Infroman 1 dan 2, mengakui adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat pada musrenbang. Masyarakat desa tampak kurang antusias mengikuti musrenbang karena banyak kegiatan yang diusulkan tetapi tidak terakomodir/terlaksana. Usulan kegiatan dalam benak masyarakat pasti diakomodir dalam kegiatan pemerintah, sementara secara proses tidak semua usulan akan diakomodir. Usulan yang diakomodir adalah usulan yang sifatnya the most priority artinya, semua usulan masyarakat akan dipress dalam musrenbang desa dan usulan hasil musrenbang desa akan dikurangi lagi dalam musrenbang kecamatan, seterusnya hingga musrenbang kabupaten. Selain itu, peran DPRD dalam menentukan RAPBD menjadi permasalahan juga karena anggota DPRD memiliki daerah pemilihan (dapil) tertentu yang akan mereka kunjungi dalam proses reses setiap tahunnya. Proses reses tersebut mengakibatkan adanya usulan pembangunan dari pemilih yang ada di dapilnya sehingga muncul usulan pembangunan baru yang tidak masuk dalam daftar usulan yang dihasilkan dari proses musrenbang. Intervensi anggota DPRD tersebut menjadi salah satu faktor berkurangnya usulan program dan kegiatan masyarakat dari musrenbang.

Pada aspek transparansi, musrenbangdesa sangat transparan dalam mendiskusikan usulan program pembangunan dari masyarakat desa dan tokoh masyarakat. Hal ini berlaku juga pada tahapan musrenbang kecamatan dimana prosesnya dimulai dari ekspose usulan program dan penandatanganan berita acara hasil musrenbang kecamatan. Hal yang berbeda justru ditunjukkan pada tahap musrenbang tingkat kabupaten, khususnya proses diskusi penetapan program dalam pagu indikatif APBD, tidak ada jaminan dari pemerintah dalam hal ini camat dan Bappeda bahwa usulan hasil musrenbang kecamatan dapat

diakomodir. Hal ini tentu saja terdapat kekosongan asas transparansi pada salah satu proses musrenbang tingkat kabupaten. Oleh sebab itu, de Cruz mengatakan bahwa ketersediaan informasi yang ditampilkan pada website pemerintahan daerah tidak menunjukkan kualitas demokrasi, melainkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengontrol aktivitas pemerintahan daerah (da Cruz et al., 2016).

Sementara pada aspek kolaborasi, praktis hanya melibatkan masyarakat desa sebagai partisipan musrenbangdes, pemerintah desa, BPD, dan pemerintah daerah. Hal ini berlaku juga pada musrenbang kabupaten dimana hanya terdapat aktor pemerintah daerah dan DPRD yang menentukan program dan kegiatan. Hal ini dikarenakan pemerintah menganggap bahwa aktor non pemerintah diluar masyarakat menjadi kalangan yang tidak terlalu mendapatkan dampak pembangunan yang dilakukan, dan dapat secara mandiri eksis dengan tata Kelola masing-masing. Sementara dalam Undang Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pelibatan berbagai stakeholder seperti asosiasi profesi, perguruan tinggi, LSM, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha. Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tahapan proses musrenbang, maka semakin rendah tingkat partisipasi, transparansi, dan kolaborasinya. Hal ini akan berujung pada tidak konsistennya program dan kegiatan yang dimasukkan dalam RAPBD dengan program yang diusulkan melalui mekanisme musrenbang.

Adapun permasalahan yang telah diungkapkan, dapat diabstraksikan melalui gambar kaya (rich picture-tahap 2) yang secara rinci dapat dilihat berikut:



Gambar 1. Rich Picture

Sumber: diolah oleh penulis, 2022

Gambar 1 menunjukkan permasalahan tidak sesuainya program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan dengan program dan kegiatan yang disetujui dalam RAPBD. Oleh sebab itu, transformasi dibutuhkan untuk mewujudkan konsistensi program kegiatan dalam RAPBD dengan usulan masyarakat dalam musrenbang.

Model Konseptual dalam rangka Memperbaiki Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menggunakan aspek Open Government

Model konseptual (tahap 4) dibangun dengan terlebih dahulu menyusun *root definition* (RD-tahap 3). RD merupakan pernyataan tujuan yang mewakili esensi dari penyelesaian masalah secara sistemik (Budiarmo et al., 2022). Formula RD dirumuskan PQR, lakukan P, oleh Q, untuk mencapai R, dengan analisis CATWOE untuk memperkaya RD (Budiarmo et al., 2022). Dengan demikian, dapat dirumuskan RD sebagai berikut: pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam musrenbang melalui transparansi proses penetapan

program dan kegiatan (P). Mekanisme transparansi tersebut dapat dilakukan, baik oleh pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom) maupun oleh Media Massa atau kolaborasi keduanya (Q). Transparansi ini dibuat dengan tujuan agar masyarakat dapat memastikan usulan program dan kegiatannya betul terakomodir dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) (R).

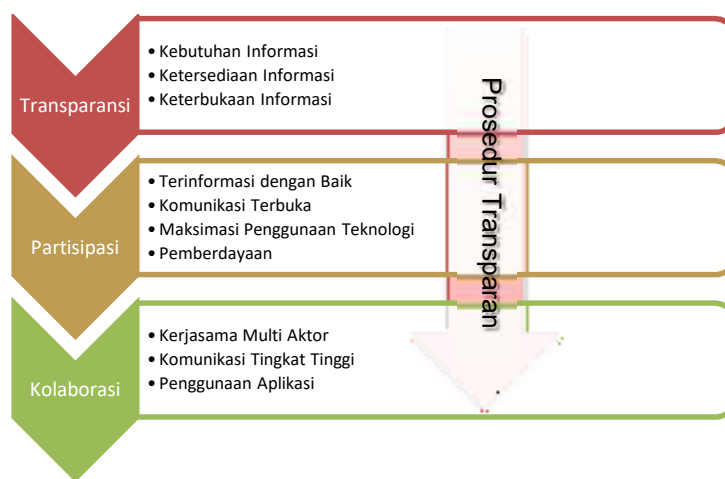
Tabel 4. Elemen CATWOE

Unsur CATWOE	Deskripsi
Customer (C)	Pemerintah Desa dan Masyarakat
Actor (A)	Pemerintah Daerah dan Media Massa
Transformation (T)	Proses penetapan program kegiatan yang awalnya tidak transparan mengakibatkan mekanisme perencanaan pembangunan bottom-up (musrenbang) hanya formalitas dan sia-sia dilaksanakan, menjadi transparansi penetapan program dan kegiatan sesuai dengan usulan pada musrenbang.
Weltanschauung (W)	Konsistensi penetapan program kegiatan dalam DIPA RAPBD dengan usulan musrenbang sehingga dapat menjadi pengungkit partisipasi dan kolaborasi pada musrenbang selanjutnya.
Owner (O)	Bupati/Walikota dan DPRD
Environmental Constraint (E)	Situasi Politik di Daerah yang Dinamis/ Intervensi Politik dan Ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sumber: diolah oleh penulis, 2022.

Adopsi aspek-aspek Open Government dalam perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi perlu dilakukan rekonfigurasi berkaitan dengan prosedurnya agar aspek tersebut bisa terintegrasi mengingat ketiganya adalah

kesatuan yang berhubungan satu sama lain. Kolaborasi sebagai *collective action* tidak akan tercipta tanpa adanya partisipasi yang mengikuti (Ansell & Gash, 2008; McDermott, 2010; Ulibarri & Scott, 2017). Sementara partisipasi masyarakat dalam mengontrol pemerintah tidak akan muncul ketika mekanisme transparansi tidak dilaksanakan (da Cruz et al., 2016; Taylor et al., 2017). Berdasarkan hal tersebut, Adapun model konseptual yang mendukung transformasi dapat dilihat berikut:



Gambar 2. Model Konseptual Penerapan Aspek Open Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sumber: diolah oleh penulis, 2022

Alur OG dalam perencanaan pembangunan diatas dapat dijelaskan bahwa transparansi merupakan unsur pertama dalam OG yang menjadi pengungkit adanya partisipasi masyarakat. Selain itu, transparansi sebagai sebuah asas, menjadi dasar mekanisme perencanaan pembangunan dari awal musrenbang tingkat desa hingga musrenbang tingkat kabupaten. Transparansi perencanaan pembangunan digerakkan oleh adanya ketersediaan informasi (*information availability*) terkait sasaran pembangunan yang akan dilakukan di sebuah wilayah. Selain itu, dalam perencanaan pembangunan daerah, antara pemerintah daerah dan masyarakat membutuhkan wadah atau sarana untuk berkomunikasi dimana pemerintah daerah sebagai sumber informasi

pembangunan dan anggaran sementara masyarakat sebagai objek pembangunan. Wadah tersebut adalah musrenbang dimana pada musrenbang tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai kebutuhan dan tindak lanjut pembangunan yang dilaksanakan (*Accessible of Information & Information Need*).

Beberapa pakar mengatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak akan efektif jika tidak ada mekanisme transparansi yang mengikuti prosesnya. Adanya keinginan untuk ikut serta didrive oleh adanya rencana pembangunan yang terinformasi dengan baik dan jelas (*well and clear informed*). Informasi yang baik dan jelas selain diinformasikan secara langsung melalui musrenbang dan sosialisasi, juga disampaikan melalui situs resmi pemerintah kabupaten dan aplikasi sistem perencanaan manajemen daerah (SIMDA) (*Using ICT and Colsulting*). Muaranya adalah masyarakat berdaya dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayahnya (*empowerment and involvement*).

Masyarakat yang berdaya akan mampu memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh sebab itu, dalam tahap kolaborasi, terjadi kerjasama antar aktor baik pemerintah, swasta, NGO, DPRD dan pihak lain yang berkepentingan (*high level cooperation*). Sebagaimana diungkapkan oleh Scott bahwa “...both by the behavior of individual network actors (e.g., to partner with politically powerful actors, align with shared interests, or optimally allocate time and effort spent collaborating) and structural considerations (e.g., social capital, network connectivity, and multi-level networks)” (Ulibarri & Scott, 2017). Oleh karena kompleksnya aktor yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, maka secara otomatis tingkat partisipasi dalam aspek kolaborasi sangat tinggi (*high participation*). Model musrenbang konvensional yang harus dihadiri oleh pemangku kepentingan secara langsung di ruang rapat akan sulit mengakomodir dan mengumpulkan aktor tersebut sehingga dibutuhkan aplikasi

mobile yang dapat digunakan oleh aktor tersebut untuk memantau progres dari usulan pembangunannya (*utilizing of application*) (Nunuk Febrianingsih, 2012).

SIMPULAN

Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi telah mengadopsi aspek-aspek *open government* yang meliputi partisipasi, kolaborasi dan transparansi. Namun aspek-aspek tersebut diadopsi masih sendiri-sendiri dan tidak *by design* oleh pemerintah daerah. Akibatnya adalah musrenbang yang telah dilakukan sejak tahun 2004 hingga saat ini masih dianggap formalitas dan kegiatan sia-sia oleh masyarakat karena program pemerintah daerah yang dilaksanakan pada tahun berjalan mayoritas bukan merupakan usulan masyarakat dalam musrenbang. Perencanaan pembangunan daerah ideal yang dapat mengadopsi aspek-aspek *open government* di Kabupaten Bekasi adalah dengan a) menjamin transparansi dalam setiap proses musrenbang mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten; b) maksimasi penggunaan aplikasi dan internet untuk menjamin mekanisme penetapan kegiatan kegiatan berasal dari usulan yang muncul sejak musrenbang tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Shanab, E. A. (2015). Reengineering the open government concept: An empirical support for a proposed model. *Government Information Quarterly*, 32(4), 453–463. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.07.002>
- Admin. (2020). Soal Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Bekasi 37 Kali diadakan ke KIP Jabar. In *Beritacikarang*. <https://beritacikarang.com/soal-keterbukaan-informasi-publik-pemkab-bekasi-37-kali-diadukan-ke-kip-jabar/>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

- Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>
- Baltador, L. A., & Budac, C. (2014). Open Government – A Long Way Ahead for Romania. *Procedia Economics and Finance*, 16(May), 557–562.
[https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00839-9](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00839-9)
- Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., Ouzounis, G., & Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. *European Physical Journal: Special Topics*.
<https://doi.org/10.1140/epjst/e2012-01703-3>
- Bearfield, D. A., & Ann O'M. Bowman. (2016). Can You Find It on the Web? An Assessment of Municipal E-Government Transparency. *American Review of Public Administration*, 47(2), 172–188.
<https://doi.org/10.1177/0275074015627694>
- Berita, T. (2020). 21 Desa Kumuh, Dana Desa Rp 60,2 M Lebih Terbuang Sia-Sia, Pemerintah Gagal? In *Klik Berita*. http://www.klikberita.co.id/opini/21-desa-kumuh,-dana-desar-p-60,2-m-lebih-terbuang-sia-sia,-pemerintah-gagal.html?fb_comment_id=1760756160618373_1760766773950645
- Budiarso, Putro, U. S., Sunitiyoso, Y., & Fitriati, R. (2022). Constructing the collaborative Working Relationships in one of the Big Four Firms. *Systemic Practice and Action Research*, 0123456789.
<https://doi.org/10.1007/s11213-021-09588-3>
- Checkland, P., & Poulter, J. (2006). *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology, and its use for Practitioners, Teachers and Students*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Checkland, P., Poulter, J., & Poulter, J. (2007). *Learning for action: a short definitive account of soft systems methodology, and its use for practitioners, teachers and students*. Wiley.
- da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2016).

- Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572>
- Data Open Government. (2021). In *Global Open Data Index*. <https://index.okfn.org/place/?filter-table=indonesia>
- Denzin, N. K., & Strauss, A. L. (2006). Qualitative Analysis for Social Scientists. In *Contemporary Sociology* (Vol. 17, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/2069712>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance and collaborative governance regimes. *Collaborative Governance Regimes*, 086, 1–30.
- Essa, W. Y. (2018). Capturing Social Capital Through Bandung City Community Index Arrangement and Development. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 169–181. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.169-181>
- Florini, A. (2007). *Right to Know: Transparency for an Open World* (A. Florini & J. A. Stiglitz (Eds.)). Columbia University Press.
- Goldsmith, S., & Eggers, W. D. (2004). *Governing by the Network: the New Shape of Public Sector*. Brookings Institution Press.
- Grønbech-Jensen, C. (1998). The scandinavian tradition of open government and the European union: Problems of compatibility? *Journal of European Public Policy*, 5(1), 185–199. <https://doi.org/10.1080/13501768880000091>
- Hansson, K., Belkacem, K., & Ekenberg, L. (2015). Open Government and Democracy : A Research Review. *Social Science Computer Review*, 33(5), 540–555. <https://doi.org/10.1177/0894439314560847>
- Hendrawan, A. (2019). *Open Government: Perkembangan dan Masa Depan*. Sindo. <https://nasional.sindonews.com/berita/1388938/18/open-government-perkembangan-dan-masa-depan>
- Jackson, M. C. (2001). Critical systems thinking and practice. *European Journal of Operational Research*, 128(2), 233–244. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(00\)00067-9](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(00)00067-9)
- Lathrop, D & Ruma, L. (2013). Open goverment: collaboration, transparency, and

- participation in practice. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). *OPEN GOVERNMENT: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice* (1st ed.). O’
- Lee, G., & Kwak, Y. H. (2012). An Open Government Maturity Model for social media-based public engagement. *Government Information Quarterly*, 29(4), 492–503. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.001>
- Lee, S. Y., Díaz-Puente, J. M., & Martin, S. (2019). The Contribution of Open Government to Prosperity of Society. *International Journal of Public Administration*, 42(2), 144–157. <https://doi.org/10.1080/01900692.2017.1405446>
- Leski Rizkinaswara. (2018). Gerakan Menuju 100 Smart City. In *Kemeterian Komunikasi dan Informatika*. <https://aptika.kominfo.go.id/2018/11/gerakan-menuju-100-smart-city/>
<https://bekasi.pojoksatu.id/baca/diskominfo-dan-humas-saling-menyalahkan-terkait-pengelolaan-laman-pemkab-bekasi>
- Maxwell, J. A. (2012). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. In *SAGE Publication* (3rd Editio). SAGE Publication.
- McDermott, P. (2010). Building open government. *Government Information Quarterly*, 27(4), 401–413. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.07.002>
- Nam, T. (2016). Challenges and Concerns of Open Government: A Case of Government 3 . 0 in Korea. *Social Science Computer Review*, 33(5), 556–570. <https://doi.org/10.1177/0894439314560848>
- Nunuk Febrianingsih. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Rechts Vinding Online*, 1(10), 277–294.
- Obama, B. (2009). *OPEN GOVERNMENT: A Progress Report to the American People*. <https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ogi->

progress-report-american-people.pdf

Open Government Indonesia. (2021). In *Open Government Indonesia*.

<https://www.opengovindonesia.org/about/1/open-government-indonesia>

Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*.

<https://doi.org/10.1080/14719030600853022>

Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama.

Taylor, R., Kelsey, T., Practical, S., Taylor, R., & Kelsey, T. (2017). *Book Review Review of Transparency and the Open Society : Practical Lessons for Effective Policy*. 1–2. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux010>

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Rösch, M. (2017). Open government and citizen participation: an empirical analysis of citizen expectancy towards open government data. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/0020852317719996>

Yang, T. M., Lo, J., & Shiang, J. (2015). To open or not to open? Determinants of open government data. *Journal of Information Science*, 41(5), 596–612. <https://doi.org/10.1177/0165551515586715>